



**PENERAPAN KEADAAN MERINGANKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP
DALAM JABATAN**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

MARIA ROSARI PUTRI

2110622062

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2023**



**PENERAPAN KEADAAN MERINGANKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP
DALAM JABATAN**

TESIS

MARIA ROSARI PUTRI

2110622062

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Maria Rosari Putri

NIM : 2110622062

Tanggal : 24 Juli 2023

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juli 2023

Yang Menyatakan,



2000
REPUBLIK BERSUDAH KUPAH
TOL. 20
METERAN
TEMPEL
67AKX048211287

(Maria Rosari Putri)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Rosari Putri

NIM : 2110622062

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PENERAPAN KEADAAN MERINGANKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DALAM JABATAN. Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Juli 2023

Yang menyatakan,



(Maria Rosari Putri)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904
Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: upnvj@upnvj.ac.id

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Maria Rosari Putri
NRP : 2110622062
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : PENERAPAN KEADAAN MERINGANKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP
DALAM JABATAN

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji

Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M.
NIDN 0022098702

Penguji I

Dr. Slamet Pri Wahyudi, SH., MH.
NIDN. 0027018603

Dekan

Dr. Subhman, S.H., LL.M.
NIDN. 0302067004

Penguji II

Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH.
NIDN 0312075804

Kaprodi

Dr. Handar S.B.S.H.M.H., M.Tr.Adm.Ke
NIDN. 0028049301

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 13 Juli 2023

PENERAPAN KEADAAN MERINGANKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DALAM JABATAN

Abstrak

Dalam memberikan pertimbangan pada suatu putusan, hakim harus memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 197 KUHP. Begitu pula dalam Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim juga wajib memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa. Namun terkait keadaan memberatkan maupun keadaan meringankan tersebut sampai saat ini belum memiliki tolak ukur atau pedoman yang jelas. Penerapan keadaan meringankan oleh hakim serta pengurangan sanksi pidana seringkali dinilai tidak tepat diberikan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat kasus penerapan keadaan meringankan terhadap Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan yang melakukan tindak pidana korupsi suap dalam jabatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis terkait relevansi penerapan keadaan meringankan pada kasus korupsi suap dalam jabatan dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta penerapan sifat baik dan jahat dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan keadaan yang meringankan pada kasus korupsi suap dalam jabatan jelas melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terutama khususnya bagi seorang pejabat, seperti dijelaskan dalam Pasal 52 KUHP yang dapat menjadi salah satu indikator dalam menerapkan keadaan yang memberatkan hukuman terdakwa yang merupakan pejabat negara. Oleh karena itu, pertimbangan suatu keadaan yang meringankan dalam kasus korupsi suap jabatan harus berdasarkan atas fakta-fakta hukum dalam persidangan yang diungkapkan secara komperhensif agar dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi seluruh pihak. Disisi lain, dibutuhkannya suatu aturan sebagai pedoman bagi hakim dalam melakukan penerapan keadaan meringankan terhadap pejabat yang menerima suap dalam jabatannya, sehingga memiliki tolak ukur yang jelas serta dapat mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan hakim dengan berlindung dibalik kata “independensi hakim”.

Kata Kunci: Keadaan Meringankan, Pertimbangan Hakim, Suap dalam Jabatan.

THE APPLICATION OF MITIGATING CIRCUMSTANCES TO CORRUPTION AND BRIBERY IN AN POSITION OF POWER

Abstract

In giving consideration to a decision, the judge must pay attention to the aggravating or mitigating circumstances of the defendant as stipulated in Article 197 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Similarly, in Article 8 paragraph (2) of the Judicial Power Law, it is stated that judges must also consider the good and bad nature of the defendant. However, the aggravating and mitigating circumstances do not yet have clear benchmarks or guidelines. The application of mitigating circumstances by judges and the reduction of criminal sanctions are often considered inappropriate. In this study, the author raises the case of the application of mitigating circumstances to Edhy Prabowo, the Minister of Marine Affairs and Fisheries, who committed the corruption crimes of bribery in position of power. This research was conducted to examine and analyze the relevance of the application of mitigating circumstances in cases of bribery in position of power in relation to the principles of good governance and the application of the good and bad nature of the defendant in the judge's consideration. This research uses statutory approach, concept approach and case approach. The results of this study explain that the application of mitigating circumstances in case of bribery in position of power clearly violates the general principles of good governance. Especially for an official, as explained in Article 52 of the Criminal Code, which can be one of the indicators in applying aggravating circumstances to defendant who is state official. Therefore, the consideration of mitigating circumstances in cases of bribery in position of power must be based on legal facts revealed comprehensively in the trial to provide justice, usefulness, and certainty for all parties. On the other hand, a rule is needed as a guide for judges in implementing mitigating circumstances against officials who accept bribes in their positions, so that they have clear benchmarks and can prevent acts of abuse of power by taking cover behind the word "judge independence"

Keywords: *Mitigating Circumstances, Judge Considerations, Bribery.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Judul dari penelitian ini ialah “Penerapan Keadaan Meringankan terhadap Tindak Pidana Korupsi Suap dalam Jabatan”. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA, Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Ketua Penguji yang memberikan masukan, saran dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan berbagi pengalaman kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang memberikan masukan, saran dan arahan bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Orangtua, suami, anak dan keluarga penulis yang tidak pernah putus memberikan doa, semangat dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh civitas akademika Universitas yang telah memberikan pengetahuan dan jasanya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

9. Rekan-rekan seperjuangan penulis kelas Pidana Angkatan 2021, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam tesis ini, oleh karena itu, kritik dan saran sangat dibutuhkan demi perbaikan kedepan. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya.

Jakarta, Juli 2023



Maria Rosari Putri

A. DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | iv |
| PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Teori & Kerangka Konseptual | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 25 |
| A. Konsep Hukum Pidana | 25 |
| 1. Kebijakan Hukum Pidana | 25 |
| 2. Pidana dan Pemidanaan | 27 |
| B. Konsep Tindak Pidana Suap dalam Jabatan | 33 |
| 1. Tindak Pidana Suap | 33 |
| 2. Jabatan Pemerintahan | 37 |
| C. Konsep Pertimbangan Hakim dalam Putusan | 45 |
| 1. Pertimbangan Yuridis | 46 |
| 2. Pertimbangan Non Yuridis | 47 |
| 3. Keadaan Meringankan dan Memberatkan | 48 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 52 |
| A. Jenis Penelitian | 52 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 52 |
| C. Sifat Penelitian..... | 53 |
| D. Analisis Penelitian | 53 |
| E. Sumber Bahan Hukum | 54 |
| | |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 56 |
| A. Relevansi Penerapan Keadaan yang Meringankan pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Suap dalam Jabatan dikaitkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik..... | 56 |

| | |
|---|-----------|
| B. Pertimbangan Pengurangan Sanksi Pidana pada Kasus Korupsi Suap dalam Jabatan dikaitkan dengan Sifat Baik dan Jahat Terdakwa..... | 67 |
| BAB V PENUTUP..... | 81 |
| A. Kesimpulan..... | 81 |
| B. Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 89 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Tindak Pidana Korupsi..... | 4 |
| Tabel 2 Unsur-Unsur Gratifikasi dan Suap..... | 16 |
| Tabel 3 Matriks Penyalahgunaan Wewenang..... | 44 |
| Tabel 4 Makna Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik..... | 61 |
| Tabel 5 Kategori Berat Ringannya Pidana..... | 79 |